

FILSAFAT MORAL HAMKA DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBANGSAAN

Dr. Sudin. M.Hum

Jurusan Filsafat Agama UIN Sunan Kalijaga

Banyak bangsa yang mengalami krisis moralitas, tidak terkecuali apa yang dialami bangsa Indonesia. Bangsa Timur, utamanya bangsa Indonesia, dikenal baik oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang mempunyai moralitas tinggi, tetapi sekarang ini realitas membuktikan lain, bangsa yang dikenal baik dalam segi moral itu tiba-tiba dilanda krisis moral. Berbagai fenomena yang terjadi, seperti banyaknya kasus pembunuhan, konflik etnis, perkosaan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain, maka hal ini dapat dijadikan sebuah dasar pembuktian bahwa krisis moral telah melanda bangsa ini maupun bangsa lain seluruh dunia, dan itu berarti sudah menjadi persoalan global.¹

Masing-masing negara mempunyai cara dan strategi sendiri dalam mengatasi krisis moral tersebut. Persoalan kebangsaan berupa krisis moralitas di Indonesia sudah sejak lama dipikirkan oleh para pendahulu. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau biasa dikenal HAMKA (1908-1981), yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. HAMKA dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai sosok kharismatik yang mempunyai integritas tinggi dalam bidang moral.

1 Abd. Haris, *Etika HAMKA: Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius* Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm . 183.

Para ilmuwan, seperti James Rush, Gerard Moussay, dan Karel A. Stenbrink, memberikan predikat kepada HAMKA sebagai seorang sejarawan, antropolog, sastrawan, ahli politik, jurnalis, dan islamolog.² HAMKA sebagai seorang intelektual yang mempunyai pengetahuan yang banyak, baik pengetahuan agama maupun umum. HAMKA menurut Fachry Ali adalah seorang pionir modernisasi Islam di Indonesia.³

Kebesaran HAMKA dalam berbagai bidang keilmuan itulah yang kemudian membuat banyak para pakar, pemerhati, dan peneliti membahas HAMKA dari berbagai sudut keahlian yang dimilikinya, seperti dari tafsir, tasawuf, ilmu kalam, atau teologi Islam, pendidikan, dan lain sebagainya.⁴ Sepengetahuan penulis, belum ada yang mengkaji atau membahas pemikiran filsafat moral HAMKA dalam kaitannya dengan kondisi bangsa Indonesia.

Pemikiran filsafat moral HAMKA dapat ditemukan pada beberapa buku yang ditulisnya, antara lain *Lembaga Budi* (1983), *Tasawuf Modern* (1983), *Lembaga Hidup* (1984), *Akhlaqul Karimah* (1992), *Falsafah Hidup* (2002), dan buku-buku HAMKA yang lain. Dalam buku-bukunya itu, tampak bahwa ia adalah seorang ahli agama (ulama) sekaligus pengkaji filsafat, sehingga dalam menguraikan pandangan-pandangannya tentang filsafat moral, ia mempunyai kekhasan corak pemikiran dibanding tokoh-tokoh lain.

Keseluruhan pemikiran HAMKA, tidak terkecuali dalam bidang filsafat moral, dibangun di atas sendi-sendi agama. Ia sangat menekankan pentingnya memperkuat tauhid, sebuah ajaran tentang Keesaan Tuhan. HAMKA bahkan mengkritik keras sebuah pandangan filsafat moral yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai agama, sebagaimana dikemukakan dalam risalahnya berjudul *Ghirah dan Tantangan terhadap Islam* (1982).

Pemikiran filsafat moral HAMKA sesungguhnya kombinasi dari pengetahuannya di bidang agama, wawasan kebangsaan, dan

2 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 15.

3 Fachry Ali, "HAMKA dan Masyarakat Islam Indonesia: Catatan Pendahuluan Riwayat dan Perjuangannya", dalam *Majalah Prisma*, Februari 1983.

4 Abd. Haris, *Etika HAMKA...*, hlm. 2.

penguasaan terhadap filsafat. Pemikiran tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan berbangsa, diungkapkan lewat syair *Syauqi Bey* di buku *Lembaga Budi* (1983).

*Wa innamal umamul akhlaqu maa baqiat
Wa in hummu dzahabat akhlaquhum dhahabuu*

Artinya:

Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa
Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi runtuhlah bangsa.⁵

HAMKA dalam beberapa tulisannya, memang tidak konsisten menggunakan istilah yang menunjukkan pada ajarannya. Kadang HAMKA menyebut secara langsung istilah moral, tapi kadang pula menggunakan istilah akhlak, adab, etika, dan budi—sebagaimana yang terlihat dalam menerjemahkan syair *Syauqi Bey* di atas. HAMKA mempunyai pemahaman yang baik terhadap sistem filsafat, baik filsafat Barat, apalagi filsafat Islam.

Perhatian HAMKA dalam bidang keagamaan bukan soal-soal ritual yang berkaitan dengan soala-soal ibadah *mahdhah* (amalan ibadah ritual yang diwajibkan), melainkan ingin mengatasi cabang-cabang ilmu tradisional. HAMKA tidak hendak membatasi dirinya dalam ilmu kalam dan ilmu akhlak yang tradisional, demi menjaga kemurnian doktrin Islam. HAMKA berani memasuki wilayah-wilayah tasawuf dan filsafat yang penuh ranjau dari segi keimanan itu.⁶

HAMKA termasuk tipologi seorang ulama yang rasional, meskipun objek kajian yang ia lakukan terhadap teks-teks atau doktrin keagamaan. Pengetahuannya yang sangat luas menuntun dirinya untuk memahami agama berdasarkan teori-teori sosial, dan termasuk pandangan filsafat.

5 HAMKA, *Lembaga Budi*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. xi.

6 Raharjo, Dawam, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risaalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 200-203.

A. Filsafat sebagai Hikmat

Filsafat, dalam pengertian yang lazim adalah berasal dari bahasa Yunani, *Philosophia*. *Philos* artinya suka, cinta, atau *philia* artinya persahabatan, tertarik kepada (sesuatu), sedangkan *shopia* artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan.

HAMKA dalam bukunya *Falsafah Hidup*, memberikan penjelasan menarik dan tampak sedikit berbeda dengan pengertian-pengertian umum, yaitu istilah “filsafat” menurutnya, terdiri dari dua suku kata yang dijadikan satu: *pilos* dan *sofos*. *Pilos* artinya ‘penggemar’ dan *sofos*, artinya ‘hikmat’ atau ‘ilmu’. Hikmat itu bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia boleh diartikan ‘rahasia’.⁷

Apa yang dimaksud dengan ‘rahasia’? Mengapa filsafat dikotasikan dengan istilah ‘rahasia’ oleh HAMKA? Inilah menariknya.

HAMKA mengatakan:

Banyak rahasia dalam alam ini. Kita tidak tahu, tetapi kita ingin tahu... Takjub, heran dan terasa bahwa diri kita sendiri dipengaruhi, dipesona oleh tanda-tanda “tanya”, seribu macam atau satu tanda “tanya”: apakah ini? Dari manakah datangnya? Kemanakah kesudahannya?

Rahasia dan penuh rahasia...

Bila sedang berpikir hendak menyelidiki, hendak tahu, apakah rahasia itu, kembalilah segala “tanya” yang sulit tadi kepada yang bertanya: mengapa saya bertanya? Siapa saya?

Rahasia.

Semua orang ingin memecahkan rahasia-rahasia besar itu. Sebab itu dapatlah dipastikan bahwa semua orang pada hakikatnya ialah kandidat failasuf, meskipun hanya sedikit sekali yang lanjut jadi filosof.⁸

HAMKA sepertinya terpukau dengan cara berpikir dan proses pencarian terhadap kebenaran yang menjadi karakteristik filsafat. Terbukti, metode penalaran filsafat ini banyak digunakan oleh HAMKA dalam melakukan analisis terhadap tema-tema tertentu.

7 HAMKA, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 7.

8 *Ibid.*

Dengan berfilsafat, HAMKA telah terbawa kepada pemahaman dan tindakan dalam realitas kehidupannya.

Kattsoff mengilustrasikan kinerja filsafat yang mempunyai peran penting dalam pembuatan “roti”. Artinya, meskipun filsafat “tidak membuat roti”, namun filsafat dapat menyiapkan tungkunya, menyisihkan noda-noda dari tepungnya, menambah jumlah bumbunya secara layak, dan mengangkat roti itu dari tungku pada waktu yang tepat. Tujuan filsafat dengan demikian ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, menemukan hakekatnya, dan menerbitkan serta mengatur semuanya itu di dalam bentuk yang sistematis.⁹

Dalam buku *Pelajaran Agama Islam*, HAMKA tampak menjadikan filsafat sebagai salah satu kerangka acuan dalam melihat hubungan antara manusia dan agama, dan termasuk pula menjadikan filsafat sebagai salah satu media dalam proses pencarian Tuhan. Di buku itu, HAMKA menegaskan pentingnya penggunaan akal untuk menganalisis persoalan-persoalan apapun, termasuk tentang Keesaan dan Kemahakuaasaan Tuhan dalam hubungannya dengan alam semesta. Misalnya, HAMKA mengutip pendapatnya al-Farabi yang mengatakan bahwasanya perjalanan seluruh alam ini diatur oleh dan dengan “*al-Aqlu al-Awwal*” (Akal Pertama).¹⁰

Mempelajari filsafat dan sekaligus menerapkannya dalam tindakan bagi HAMKA sesungguhnya merupakan aktivitas mulia, terutama bagi orang yang menyukai tantangan. Perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia, bahkan menurut HAMKA, tidak bisa dilepaskan dari peran filsafat.

Adapun di tanah air kita Indonesia ini, satu tanah air yang di masa dahulu telah pernah mencapai kemajuan tinggi, sejak zaman Sriwijaya, Malaka, Majapahit, Mataram, Aceh Darus Salam, dan Pagaruyung, mustahil akan sampai ke derajat tinggi itu, kalau kemajuan filsafat belum ada.¹¹

9 Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, cet. ke-7 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 3.

10 HAMKA, *Pelajaran Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), hlm. 12.

11 HAMKA, *Falsafah Hidup...*, hlm. 14.

Orang yang berfilsafat menurut HAMKA, telah melakukan transformasi pengetahuan dari yang awalnya mungkin dianggap “sulit” menjadi hal yang “mudah”, sebab begitulah karakter seorang filosof dan pengkaji filsafat. HAMKA memuji filosof Socrates, yang menurut dia mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan serta kemajuan filsafat.

Failasuf yang mula-mula membawa soal dari langit ke bumi, atau dari alam ke insan itu ialah Socrates! Dan beliau pula yang mula-mula menggelari dirinya failasuf, dengan maksud yang bersahaja, yaitu “penggemar hikmat”. Itulah sebabnya maka ahli filsafat berkata: “Beberapa lamanya filosof tergantung di langit, maka datang Socrates mengaitnya dan diturunkannya ke bumi”.¹²

HAMKA menempatkan para filosof sebagai seorang yang hebat dan mampu menjelaskan persoalan-persoalan yang oleh orang lain mungkin dianggap rumit. Filsafat dan para filosofnya bagi HAMKA merupakan aktivitas sangat mulia, yang tidak hanya mampu menginspirasi dirinya dalam bertindak maupun aktivitas menulisnya, tetapi juga banyak memberikan pencerahan bagi orang lain, dan karenanya HAMKA mengapresiasi filsafat.

B. HAMKA sebagai Pemikir Filsafat

Apresiasi terhadap pemikiran HAMKA, terutama dalam bidang filsafat, sangatlah beragam di kalangan pemerhati dan pengkaji-pengkajinya. Adakalanya, HAMKA dipuji dengan sangat tinggi, namun ada pula yang menganggap pemikirannya biasa-biasa saja. Perbedaan pandangan mengenai pemikiran HAMKA tersebut terkait dengan unsur-unsur filsafat dalam pemikirannya, dan termasuk kategori HAMKA sebagai seorang filosof atau tidak.

Mochtar Naim, misalnya, memberi predikat HAMKA sebagai seorang filosof di zaman modern yang dimiliki bangsa Indonesia. Apresiasi ini oleh Muchtar Naim diberikan karena melihat betapa

¹² *Ibid.*, hlm. 9.

luasnya wawasan pengetahuan HAMKA.

Buya kita ini bukan sekadar ulama, tapi segala-gala. Beliau ya pujangga, ya sastrawan, ya penyair, ya wartawan, ya budayawan. Beliau ya orator, ya ahli pidato, ya penulis, ya kolumnis, ya penerbit. Beliau ya politikus, ya pembaharu, ya pendidik, ya mahaguru, ya filosof.¹³

Pernyataan Mochtar Naim di atas menunjukkan apresiasi yang sangat positif terhadap diri HAMKA dan pemikiran-pemikirannya. HAMKA bagi Mochtar Naim memiliki kemampuan wawasan pengetahuan yang luar biasa hebat, sehingga layaklah HAMKA disebut seorang filosof. Di sini, Mochtar Naim memang termasuk salah seorang yang pro atau setuju terhadap predikat HAMKA sebagai seorang filosof.

Pandangan lain yang sedikit berbeda dengan Muchtar Naim adalah dari Abdurahman Wahid, yang menganggap HAMKA tidak mengenal secara baik terhadap tradisi filsafat. Tidak seperti Mochtar Naim, Abdurahman Wahid justru menolak kategori HAMKA sebagai seorang filosof.

Tidak adanya Buya HAMKA dengan pemikiran falsafi ini tampak antaranya dalam caranya menggunakan kata falsafat itu sendiri dalam tulisan-tulisannya. Seperti yang digunakannya sebagai judul salah satu bukunya, *Falsafat Hidup*, yang isinya justru mencerminkan refleksi yang nonfilosofis! Tidak ubahnya orang Jawa yang menyatakan: “Falsafat saya adalah *alon-alonwaton kelakon*”.¹⁴

Penilaian Abdurahman Wahid terhadap HAMKA itu, menurut Abd. Haris, tidak dapat dipertahankan argumentasinya, sebab pandangan HAMKA tentang filsafat tampaknya tidak sesempit sebagaimana yang digambarkan Abdurahman Wahid tersebut.¹⁵

13 Panitia Peringatan 70 Tahun HAMKA, “*Kenang-kenangan 70 Tahun HAMKA*” (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 189.

14 Nasir Tamara, dkk (ed.), *HAMKA di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 2).

15 Abd. Haris, *Etika HAMKA...*, hlm. 11-12.

Dalam pengamatan Haris, HAMKA bukan sebagai orang yang mengikuti aliran “puritanisme” yang anti filsafat, sebagaimana didengungkan oleh kaum Wahabi, tetapi dia adalah orang yang mengikuti aliran “pembaharuan” dalam Islam yang justru menganjurkan penggunaan filsafat untuk memperluas wawasan dalam beragama.¹⁶

Dari penjelasan di atas, bahwa memang terjadi perbedaan pandangan antara mereka yang pro dan yang kontra terhadap pemikiran HAMKA, apakah dia seorang filosof atau bukan; dan apakah pemikiran-pemikiran HAMKA bercorak filosofis atau tidak. Di satu sisi, ada Mochtar Naim, dan diperkuat oleh Abd. Haris yang setuju terhadap corak filosofis pada pemikiran HAMKA, sedangkan di sisi lain, ada Abdurahman Wahid yang menganggap sebaliknya, yaitu pemikiran HAMKA tidaklah filosofis.

Perbedaan pandangan di antara pengkaji HAMKA itu merupakan hal yang wajar, namun untuk mengetahui kebenarannya, penting untuk memeriksa ulang pandangan-pandangan HAMKA langsung terhadap filsafat, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tentang apakah HAMKA seorang filosof atau bukan, sebenarnya terdapat pengakuan jujur HAMKA, yang dirinya merasa tidak pantas “bergelar” filosof.

HAMKA mengatakan:

Memang filsafat membuat orang takut. Padahal, artinya telah dipermudah oleh Socrates sendiri, filosof artinya “Penggemar Hikmat”. Saya gemar akan “Hikmat”, tetapi saya belum berani bergelar filosof.¹⁷

HAMKA memahami filsafat dan bagaimana menjadi seorang filosof, tidak seperti dalam pemahaman atau pengertian Barat. Bagi HAMKA, mempelajari filsafat berarti usaha sungguh-sungguh untuk mengungkap apa yang ia sebut sebagai “rahasia”. Aktivitas ini mengandaikan usaha menggunakan pikiran atau akal secara maksimal untuk memecahkan segala persoalan yang termasuk dalam kat-

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ HAMKA, *Falsafah Hidup...*, hlm 18.

egori “rahasia” itu.

Dari sana, dengan mencermati pemikiran-pemikiran HAMKA, dapatlah disimpulkan bahwa ia lebih tepat disebut sebagai “pemikir filsafat”, daripada seorang filosof. Seorang “pemikir filsafat” mengandaikan syarat-syarat yang sangat longgar bagi mereka yang berminat mempelajari filsafat, sehingga dengan demikian, semua orang yang berpikir secara radikal terhadap persoalan-persoalan kehidupan, dapat disebut “pemikir filsafat”—sebagaimana dicontohkan oleh HAMKA.

C. HAMKA dan Religiositas Moral Kebangsaan

1. Pemahaman Integratif-Rasional terhadap Ajaran Agama

HAMKA sebagai seorang ulama, pemikiran-pemikiran keagamaannya tidak bercorak tekstual-normatif, tetapi juga diikuti oleh pemahaman yang bersifat rasional. Antara pemahaman yang tekstual dan rasional ini oleh HAMKA dipadukan sebagai basis pengetahuannya dalam memahami ajaran agama, termasuk pula menyangkut persoalan-persoalan *mu’amalah*, sosial-kehidupan.

Mahaman agama bagi HAMKA tidak semata-mata dipahami secara tekstual *taken for granted*, dan tidak pula dipahami secara liar berdasarkan akal semata. Keduanya bagi HAMKA harus diselaraskan, atau dalam bahasa lain perlu “diintegrasikan”, sebab teks agama tidaklah berarti apa-apa tanpa pemahaman lewat akal. Di antara keduanya (teks agama dan akal) terjadi simbiosis-mutualis-tis yang saling membutuhkan satu sama lain.

Dengan cara itulah, HAMKA telah melakukan beberapa hal yang penting.

Pertama, HAMKA melakukan kontekstualisasi terhadap berbagai pengertian dalam al-Qur’an. Misalnya, dia memberikan arti baru terhadap kata-kata seperti ihsan, amal saleh, tawakkal, dan begitu banyak istilah lain dalam al-Qur’an. HAMKA juga melakukan interpretasi ajaran-ajaran al-Qur’an dengan pengalaman-pengalaman hidup yang konkret. *Kedua*, HAMKA melakukan semacam rekonstruksi terhadap pengalaman

hidup menjadi realitas baru, berdasarkan ayat-ayat yang diperlakukan sebagai teori atau hipotesis. Dengan cara itulah dia menganjurkan kepada orang untuk melakukan pendalaman terhadap arti hidup dan pengalaman sehari-hari. Hal itu sangat tampak dalam caranya menginterpretasikan arti bahagia. Dia tidak menjelaskan arti bahagia itu secara verbal yang kerap kali menghasilkan keterangan yang tautologies, yang seringkali dilakukan oleh “ahli” agama. Dia menjelaskan bahagia dengan berbagai peristiwa konkret, sehingga bahagia itu mengandung berbagai dimensi.¹⁸

Menurut HAMKA, jika pengetahuan dan perilaku seseorang hanya berpegang pada akal, maka akan cenderung pada hawa nafsu. Sebaliknya, jika memahami agama secara tekstual tanpa diikuti oleh pemikiran yang rasional, maka akan menjadi seorang yang konservatif. HAMKA mendukung sikap moderat, yaitu dengan melakukan integrasi dan sinergisitas peran akal dan ajaran agama itu sendiri.

HAMKA mengatakan:

Kalau terjadi pertandingan antara akal dengan hawa nafsu, kedua-duanya sama-sama ada pembantu. Akal dibantu oleh Nur Allah, oleh hidayah Tuhan, dan nafsu dibantu oleh fitnah setan, oleh gelap iblis. Itulah sebabnya maka orang yang menu-ruti suara hawa nafsu menjadi ingkar. Itu pula sebabnya maka filsafat akal dan hawa nafsu ini sampai dipegang oleh orang Persia dahulu kala, yang menyangka Tuhan itu dua, pertama Tuhan Nur, cahaya, akal, kebaikan, kejujuran dan kemuliaan. Kedua, tuhan *Zhulm*, Tuhan kegelapan, kutukan, setan dan kejahatan.¹⁹

Prinsip HAMKA tersebut itulah yang kemudian berpengaruh terhadap pemikiran filsafat moralnya. Hal ini juga relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Hardjana, bahwa bagi orang beragama, kebaikan yang mendorongnya untuk hidup berpegang pada nilai moral bukanlah kebaikan yang ditemukan oleh akal sehatnya sema-

18 Raharjo, Dawam, *Intelektual Intelegensia...*, hlm. 212-213.

19 HAMKA, *Falsafah Hidup...*, hlm 63.

ta. Karena bila demikian, hidupnya betapapun baiknya tidak dapat disebut sebagai hidup orang beriman. Paling-paling hanya disebut sebagai hidup orang bijak.²⁰

HAMKA sangat keras mengkritik pemikiran filsafat moral yang sekularistik, apalagi yang cenderung ateistik, seperti yang pernah ia kemukakan kritiknya kepada Jean Paul Sartre. Pemikiran filsafat moral Sartre menurut HAMKA sangatlah berbahaya datipada paham ateis atau komunis, apalagi jika diikuti tidak hanya oleh kaum terdidik, tapi juga oleh masyarakat Indonesia.

Berikut akan dikutip pernyataan HAMKA:

Seorang failosof bernama Jean Paul Sartre, yaitu seorang Yahudi mengajarkan filsafat wujudiyah (eksistensialisme) yang menganjurkan kesadaran atas wujud diri. Kewujudan kita di dunia ini lebih hendaklah dimanfaatkan bagaimana adanya. Filsafat ini lebih ekstrem lagi dari Komunis, yang penciptanya juga orang Yahudi. Segala ajaran agama, segala nilai-nilai akhlak, moral, mental, dan sebagainya itu, hanya dibuat-buat saja oleh manusia, untuk meniadakan dirinya yang ada. Jika segala nilai itu diperturutkan, kosonglah arti wujud kita di dunia ini. Maka bebaslah orang berkawan, dengan tidak usah menikah.²¹

HAMKA menolak filsafat moral yang tidak berdiri di atas norma-norma agama, sebab menurutnya dipastikan akan mengarah pada corak sekularistik dan ateistik. Bagi HAMKA, filsafat moral harus diimbangi dengan pengetahuan yang bersumber dari agama, dan yang terpenting lagi, pemikiran apa pun, termasuk filsafat moral haruslah dibangun di samping di atas agama, juga di atas prinsip-prinsip atau karakter sebuah bangsa.

20 AM. Hardjana, *Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 85.

21 HAMKA, *Ghirah dan Tantangan terhadap Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 36.

2. Sikap Moral dalam Kehidupan Berbangsa

Filsafat moral HAMKA yang bercorak religious, rasional, dan kebangsaan tersebut dapat secara jelas ditemukan pada penjelasannya terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, baik menyangkut pemerintahan secara langsung, maupun profesi. Haris (2010; 143) dalam menjelaskan sikap moral HAMKA ini memasukkan ke dalam sub tema tentang “etika terapan” atau *applaid ethics* (*al-akhlaq al-‘amaliyah*), yaitu menunjuk apa yang dilakukan berkaitan langsung dengan tingkah laku manusia.

Pendapat Haris itu merupakan interpretasi dari kata “budi” yang digunakan HAMKA dalam beberapa tulisannya, seperti “budi pemegang pemerintahan”, namun dalam tulisan ini, penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Haris. Istilah budi, tidak selalu dipahami sebagai “etika”, tetapi dapat pula diinterpretasikan ke dalam persoalan “moral”—termasuk pula penggunaan teknis istilahnya.

Berikut ini ditunjukkan beberapa sikap moral yang terkait erat dengan pandangan filsafat moral HAMKA yang bercorak *religious*-kebangsaan, tentang moralitas di lembaga pemerintahan. HAMKA menjelaskan prinsip-prinsip moral dalam pemerintahan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin negara orang atau pengambil kebijakan dalam suatu negara. Prinsip-prinsip moral itu oleh HAMKA dituangkan dalam bukunya *Lembaga Hidup*.

Di dalam buku itu, yang oleh HAMKA diberi judul “Budi Orang yang Memegang Pemerintahan”, ia menyalin surat politik Taher bin Husain, seorang pahlawan perang dan pemerintahan yang sangat masyhur di zaman Khalifah al-Makmun. Taher mewasiatkan sejumlah pesan penting kepada anaknya, Abdullah agar menjadi Wali Negeri di Riqqah dan Mesir. Surat ini kemudian diadopsi oleh HAMKA dengan menyalinnya kembali, yang sekaligus juga menjadi pandangan moralnya terkait dengan prinsip-prinsip moral di lembaga pemerintahan.

Pertama, seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan (pemerintahan) hendaknya bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa dan

Maha Kuasa, tiada syarikat bagi-Nya.²²

Kedua, seorang pemegang kekuasaan harus berbuat ihsan. Pemahaman ihsan di sini tidak seperti dijelaskan oleh hadis bahwa "... engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Dia melihatmu", namun oleh HAMKA dipahami secara tekstual, yaitu perbuatan baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama.

HAMKA mengatakan:

Allah telah berbuat ihsan (baik) kepada engkau lantaran jabatan ini. Sebab itu berbuat ihsan pulalah engkau kepada hamba Allah, yang diserahkan-Nya menjaganya kepada engkau. Lazimilah keadilan, berdirilah membela haknya, dan jagalah batas larangan dan suruhan Allah.²³

Berbuat baik dengan demikian, menurut HAMKA tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga akan berdampak positif kepada orang lain.

Ketiga, seorang pemegang kekuasaan harus mempertahankan hak milik rakyat, membela kepentingan dan kehormatannya, menjaga darah mereka agar tidak tertumpah, tentramkan dan berilah mereka kesenangan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Keempat, seorang pemegang kekuasaan harus berhati-hati dengan tindakannya, karena akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di dunia kepada rakyat yang dipimpin, tapi juga kelak di akhirat, kepada Allah SWT. Seorang pemimpin harus sadar bahwa kekuasaan yang ia jalankan sesungguhnya adalah amanah Allah untuk memberikan "pelayanan" terbaik untuk rakyatnya.

Engkau bertanggungjawab di hadapan Allah, engkau akan ditanyai kebaikanmu akan diganjar, kejahatanmu sedemikian pula. Apa saja yang engkau kerjakan lebih dahulu dan mana pula yang engkau letakkan terkemudian. Semuanya itu kehendak kepada kecerdasan faham, akal dan pandanganmu. Sebab itu janganlah engkau berpaling kepada yang lain, hadapkan

22 HAMKA, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 35.

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*

semata-mata pekerjaan kepada-Nya. Jadikanlah Allah sebagai pemimpin di dalam segala pekerjaanmu. Dan rakyatmu jadikan masalah pertama yang akan kamu urus di dalam hidupmu sehari-hari. Itulah yang mula-mula diperingatkan Tuhan kepadamu.²⁵

Kelima, seorang pemegang kekuasaan harus menjalankan kewajiban shalat lima waktu, karena dengan mengerjakan ibadah itu, dapat mencegah kemungkaran. Menurut HAMKA, meskipun seorang pemimpin disibukkan dengan urusan pemerintahan, tidak seharusnya meninggalkan shalat lima waktu, bahkan kalau perlu, seharusnya seorang pemimpin memberikan contoh kepada rakyat dengan rajin shalat berjamaah serta membaca al-Qur'an.

Yang utama sekali dan yang mula-mula engkau perhatikan hendaknya, atau yang akan jadi pusat hubungan dari segala pekerjaan yang akan engkau kerjakan ialah mendekati Allah. Kerjakan shalat lima waktu dan hidupkan shalat berjamaah, supaya rakyatmu mengikuti di belakangmu dengan patuh. Bukan sembahyang itu saja, malahan segala sunnat-sunnatnya dan tertibnya, sampai kepada kesempurnaan wudhu' dan bersuci, semuanya harus engkau perhatikan. Setelah engkau menjadi imam, baca Qur'an dengan fasih, sempurnakan rukuk dan sujudmu dan tasyahudmu. Hadapkan kepada Allah segala niat dan penglihatanmu. Engkau ketika itu laksana seorang yang membawa jamaahmu menghadap ke hadapan hadirat Allah, dan engkau sendiri mengepalai angkatan ini.²⁶

Keenam, seorang pemegang kekuasaan hendaklah memohon pertolongan kepada Allah ketika menghadapi suatu permasalahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Di sinilah menurut HAMKA pentingnya seorang pemimpin yang *religious* dan mengerti agama. "Sesungguhnya perhiasan yang paling utama bagi si pemegang kekuasaan ialah paham akan agama, menuntut rahasianya dan mengajak orang lain juga mengetahuinya, setelah itu

25 *Ibid*,

26 *Ibid.*, hlm. 36.

mendekatkan diri kepada Allah”.²⁷

Ketujuh, seorang pemegang kekuasaan hendaknya melakukan pekerjaan dengan hati-hati penuh perhitungan. Perhitungan yang jitu niscaya akan mendatangkan hasil yang diharapkan, begitu pula pekerjaan yang dilakukan dengan hati-hati menandakan tingkat kecerdasan seseorang.²⁸

Kedelapan, seorang pemegang kekuasaan tidak boleh meremehkan urusan akhirat. Dalam salinan HAMKA itu, secara eksplisit Taher bin Husain menerangkan bahwa “menuntut akhirat jangan sekali-kali dilalaikan, demikian juga sunnah yang terkenal. Hendaknya cari jalan yang utama, banyakkkan memohon kepada Allah, banyakkkan pula berbuat kebajikan dan pertolongan kepada yang lemah”.²⁹

Kesembilan, seorang pemegang kekuasaan hendaknya tidak segan mendatangi orang yang mulia, minta petunjuk dan nasehat kepadanya, supaya bertambah tinggi martabat dan hubungan dengan orang-orang awam dan orang-orang *khawwas*.³⁰

Kesepuluh, seorang pemegang kekuasaan hendaklah memperbaiki prasangka kepada Allah. Karena dengan baik sangka itulah akan dapat memimpin rakyat. Prasangka baik itu pula juga harus dilakukan kepada sesama umat manusia, apalagi seorang pemimpin kepada rakyatnya.

Jangan suka menuduh seorang yang suka engkau serahi mengerjakan suatu perbuatan, sebelum engkau ketahui dan selidiki betul lebih dahulu pekerjaannya. Sebab menjatuhkan tuduhan *syak wasangka* kepada mereka, adalah dosa yang amat besar. Perbaikilah sangka-sangka teman sejawatmu, hilangkan buruk sangka. Baik sangkalah yang akan menambah hatinya dekat dan bertambah jujur memikul pekerjaan yang engkau serahkan.³¹

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*, hlm. 37.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*

Kesebelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya menjadikan keburukan yang identik dengan perbuatan syaitan sebagai musuh. “Syaitan biasanya menusuk-nusuk buruk sangka itu ke dalam hatimu, sehingga engkau diserang oleh kesusahan. Kesusahan menjadi penyakit dan menghilangkan ketentraman hidupmu”.³²

Keduabelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya mengikhlaskan niat di dalam segala pekerjaan. Bekerjalah meluruhkan diri sendiri. kerjakanlah itu dengan insaf, bahwasanya seorang pemimpin bertanggungjawab sangat besar atas pekerjaan yang dikerjakan.³³

Ketigabelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya menjalankan kepemimpinan di dalam garis agama dengan jalan yang lurus. “Fikir undang-undang Allah terhadap orang yang berbuat salah menurut kadar kesalahannya. Janganlah dilalaikan, jangan diabaikan dan jangan ditakhirkan hukuman kalau telah putus. Kalau engkau berlaku sia-sia dan lalai, itulah kelak yang akan mendatangkan jahat sangka orang atas dirimu”.³⁴

Keempatbelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya menepati janjinya jika ia pernah berjanji. Tidak boleh berdusta. “Sebab dusta itulah sumber segala dosa, sedang kepalsuan dan hasung fitnah tidaklah membawa keamanan kepada yang menyiarkannya dan orang yang berkawan dengan dia tidak pula akan terpelihara dirimu dan sempurna budi pekertimu”.³⁵

Kelimabelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya mengasihi orang yang mencintai kedamaian, kejujuran, kebenaran, dan membela orang yang lemah sebagai bentuk silaturhami dengan mereka. “Tunjukkan di hadapan rakyat bahwa engkau tiada terpegaruh oleh hawa nafsu busuk dan sewenang-wenang. Dengan adil jalankan siasat, dirikan kebenaran, karena dengan mendirikan kebenaran itulah engkau akan dapat mencapai *sabilil huda*, jalan petunjuk Tuhan”.³⁶

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*, hlm. 38.

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*

Keenambelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya mampu menahan diri ketika marah. Dalam keadaan seperti ini, seorang pemimpin justru dianjurkan untuk sabar dan bisa memaafkan kesalahan seseorang.³⁷

Ketujuhbelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya ikhlas bekerja semata-mata karena Allah. Perbaiki niat, keyakinan, dan orientasi kepemimpinan. “Ketahuilah bahwa kekuasaan itu di tangan Allah semata-mata, diberikan-Nya kepada barang siapa yang dikehendakinya dan dicabut-Nya dari pada barang siapa yang dikehendaki-Nya”.³⁸

Kedelambelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya tidak memperturutkan nafsu serakah atau tamak, sebab yang demikian itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

“Yang akan engkau jadikan perbendaharaan dan isi simpanan adalah berbuat kebaikan kepada sesama manusia, takwa kepada Allah dan memperbaiki nasib rakyat, memakmurkan kampung halaman. Selidiki segala hal ihwalnya, peliharakan darahnya dan bantu orang-orang yang sengsara”.³⁹

Kesembilanbelas, seorang pemegang kekuasaan hendaknya jangan menganggap remeh dan ringan dosa yang diperbuat, sebab tidak ada dosa yang ringan. Seorang pemimpin seharusnya lebih mengutamakan kebaikan daripada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan dan dosa.

Jangan mendekat kepada orang pendengki, jangan sayang kepada orang yang durjana (*fajir*). Jangan berhubungan dengan orang yang ingkar akan kebenaran. Jangan membenarkan pembawa fitnah. Jangan diambil orang fasik menjadi teman. Jangan dipuji orang yang beramal karena mencari puji manusia (*riya*). Jangan menghinakan manusia. Jangan dikatakan halal barang yang haram. Jangan menunjukkan suka kepada orang

37 *Ibid.*

38 *Ibid.*, hlm. 39.

39 *Ibid.*

yang suka bermain-main. Jangan suka janji. Jangan membanggakan diri. Jangan dinyatakan kemarahan di wajahmu. Jangan menyebut perkara yang masih diharap. Jangan berjalan di atas bumi Allah dengan angkuh. Janga dibela orang yang salah.⁴⁰

Keduapuluh, seorang pemegang kekuasaan hendaknya banyak bertanya dan konsultasi kepada orang yang ahli agama atau ahli fiqih. “Dekati orang yang luas pengalaman, yang panjang akal dan pendapatan dan hikmatnya”.⁴¹

Keduapuluhsatu, seorang pemegang kekuasaan hendaknya memperhatikan kesejahteraan aparat keamanan negara—termasuk kesejahteraan rumah tangganya—lapangkan kehidupan mereka sehingga terhindar dari kemiskinan.

Kelapangan penghidupan bala tentara menyebabkan pekerjaannya teratur, hatinya bertambah taat dan ikhlas, dadanya bertambah lapang dan keamanan negara terjamin. Tidak ada suatu kesenangan dan ketentraman bagi seorang sultan melebihi dari kejernihan muka tentaranya dan rakyatnya lantaran dapat perlindungan dari raja, dapat pemberian dan keinsafan, pertolongan dan kasih sayang, kebajikan dan keluasan.⁴²

Keduapuluhdua, seorang pemegang kekuasaan hendaknya menghindari pemikiran yang bersifat *syubhat* (ragu-ragu). “Menegakkan hujjah hendaknya teguh-teguh. Di dalam menegakkan hukum terhadap rakyat, jangan terpengaruh oleh rasa sayang dan benci. Jangan terpengaruh karena dia pandai mengambil hati dan jangan pula terpengaruh karena cercaan dan berungut orang yang mencerca”.⁴³

Keduapuluhtiga, seorang pemegang kekuasaan hendaknya memperhatikan dan mengawasi dengan baik persoalan pajak dan cukai.⁴⁴ Pajak dan cukai mempunyai kontribusi yang besar untuk

40 *Ibid.*, hlm. 40.

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

43 *Ibid.*, hlm. 41.

44 *Ibid.*

mendukung kemajuan dan perekonomian bangsa.

Keduapuluhempat, seorang pemegang kekuasaan hendaknya rela dan ikhlas menerima kebenaran (kritik, masukan) dari orang lain. Karena kebenaranlah yang membawa kepada persatuan kekal. Hendaklah tetap membiasakan kemauan umum.⁴⁵

Keduapuluhlima, seorang pemegang kekuasaan hendaknya ketika akan memutuskan suatu perkara atau kebijakan, memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Jika dengan aturan baru itu telah diketahui akan menimbulkan akibat positif, maka putuskanlah dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, jika dalam keputusan itu masih ragu, maka hendaknya konsultasikan dengan para ahli atau orang-orang yang lebih berpengalaman.⁴⁶

Keduapuluhenam, seorang pemegang kekuasaan hendaknya beristikhrah meminta pertimbangan kepada Allah di setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam mengerjakan suatu pekerjaan di hari itu, hendaknya menyelesaikannya di hari itu pula tanpa menundanya, sebab di esok hari akan bertambah untuk menghadapi masalah baru, bukan yang hari sebelumnya.⁴⁷

Keduapuluhujuh, seorang pemegang kekuasaan hendaknya memerhatikan rakyatnya yang miskin. Seorang pemimpin dituntut mempunyai keberanian dan kemauan kuat untuk “mengurusi” langsung rakyatnya yang miskin itu. Jika seorang pemimpin membutuhkan staf untuk membantunya, maka ia pun dituntut untuk memilihnya dengan benar yang dapat mendukung programnya.

Urusan fakir dan miskin, atau orang yang tidak sanggup datang sendiri menyampaikan keperluannya, karena takut, hendaklah engkau kerjakan sendiri, jangan diserahkan ke tangan orang lain. Kalau orang itu datang terimalah dengan baik dan tanamlah orang-orang yang akan menjadi wakilmu mengurus keperluan orang-orang itu, tetapi hendaklah wakil itu yang ada perasaan santun terhadap orang yang melarat.⁴⁸

45 *Ibid.*

46 *Ibid.*, hlm. 42.

47 *Ibid.*, hlm. 42-43.

48 *Ibid.*, hlm 43.

Keduapuluhdelapan, seorang pemegang kekuasaan hendaknya mengetahui harta benda atau kekayaan para staf yang membantunya di pemerintahan.⁴⁹ Jangan sampai seorang pemimpin dan juga para stafnya mengumpulkan barang dan harta haram dari hasil korupsi atau menilap uang rakyat.

Keduapuluhsembilan, seorang pemegang kekuasaan, di samping perlunya memerhatikan harta para staf, ia perlu pula memerhatikan juru tulis atau sekretaris. Seorang pemimpin hendaknya mempermudah segala urusan kesekretariatan terkait dengan surat menyurat—jika itu memang mengandung unsur kebenaran, tetapi jika sebaliknya, maka hendaklah ia memberikan keterangan berupa kritik dan klarifikasi.

Sediakan waktu untuk membuat hubungan dengan masing-masing mereka. Perhatikan surat-surat yang dikirimkan padamu dengan baik, masukkan ke dalam penglihatan, pendengaran dan hatimu segala perkara itu. Segala isinya yang bersetuju dengan kebenaran hendaklah disetujui, tandatangani, kemudian itu serahkan kepada Allah. Mana ada salah, hendaklah tolak dan bantah sekeras-kerasnya.⁵⁰

Ketigapuluh, seorang pemegang kekuasaan hendaknya berbuat adil dengan memberi perlindungan kepada orang-orang yang berbeda agama,⁵¹ yaitu dengan berdasarkan aturan undang-undang yang menjadi konstitusi.

D. Simpulan

Tipologi pemikiran dan ketokohan HAMKA tidak hanya sebagai seorang ulama atau agamawan, tetapi juga ia adalah seorang intelektual yang menguasai banyak disiplin ilmu, baik sosial, politik, dan persoalan moralitas. Pemikiran HAMKA dalam bidang filsafat moral bersifat rasional-religius.

HAMKA meskipun berlatarbelakang pengetahuan agama,

49 *Ibid.*, hlm. 44.

50 *Ibid.*

51 *Ibid.*

tetapi dalam memahami realitas kehidupan tidak sepenuhnya tekstual dan konservatif. Sebaliknya, HAMKA justru tampak sangat rasional dengan menjadikan akal sebagai salah satu sumber yang dapat menentukan baik atau tidaknya suatu tindakan.

Karakteristik pemikiran filsafat moral HAMKA bahkan tidak hanya rasional dan religious semata, tetapi ia telah “menciptakan” corak dan tipologi baru, yaitu semangat kebangsaannya yang melingkupi setiap ide-idenya tentang moral. HAMKA mengkritik tipologi moral yang cenderung sekuler, liberal, atau yang berusaha menjauhkan moral dari agama.

Pandangan-pandangan moral HAMKA cenderung religius, yang dibangun di atas sendi-sendi agama, juga karena keprihatinannya terhadap kondisi bangsa, yang menurut pengamatannya masyarakat waktu itu mulai dipengaruhi oleh corak pemikiran moral yang barasal dari Barat dan cenderung ateistik. HAMKA kemudian menggali ajaran agama Islam, lalu merumuskan dalam bentuk formula yang tepat bagi masyarakat agar sebagai bangsa, menurutnya harus kuat dan tidak perlu terpengaruh oleh moral Barat, sebab tradisi masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi moral ketimuran, yang nyata-nyata berlawanan dengan apa yang ditawarkan oleh para ahli moral Barat.

HAMKA memadukan pengetahuan yang bersumber dari agama, moral, dan realitas kebangsaan Indonesia, sehingga sistem moral ini membentuk apa yang dalam penelitian ini disebut religiositas moral kebangsaan. Antara agama, moral, dan kebangsaan menurut HAMKA tidak boleh dipisahkan satu sama lain, sebab ketiganya adalah satu paket yang dapat melakukan transformasi menuju kehidupan yang lebih baik. ❀

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry, "HAMKA dan Masyarakat Islam Indonesia: Catatan Pendahuluan Riwayat dan Perjuangannya", dalam *Majalah Prisma*, Februari 1983.
- HAMKA, *Falsafah Hidup*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- _____, *Ghirah dan Tantangan terhadap Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- _____, *Lembaga Budi*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- _____, *Lembaga Hidup*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- _____, *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1956.
- Hardjana, AM., *Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Haris, Abd., *Etika HAMKA: Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius* Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Kattsof, Louis O., *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, cet. ke-7 Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Panitia Peringatan 70 Tahun HAMKA, "*Kenang-kenangan 70 Tahun HAMKA*", Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Raharjo, Dawam. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.
- Tamara, Nasir dkk (ed.), *HAMKA di Mata Hati Umat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.